

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah salah satu sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Indonesia menjadi peluang besar untuk mengembangkan pariwisata sebagai pendorong ekonomi, pencipta lapangan kerja, serta sarana untuk menjaga budaya dan lingkungan. Salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang sekarang banyak dilakukan adalah pembentukan desa wisata. Dalam konsep ini, masyarakat diajak untuk aktif terlibat dalam merancang, mengelola, dan mengembangkan potensi wisata di desa mereka sendiri. Konsep ini juga mendorong semangat gotong royong, kemandirian, dan pelestarian budaya lokal. Dari sudut pandang ilmu ekonomi pembangunan, desa wisata adalah cara untuk mendiversifikasi kegiatan ekonomi masyarakat desa. Artinya, tidak hanya mengandalkan pertanian saja, tetapi juga memanfaatkan sektor pariwisata untuk menambah penghasilan. Dengan adanya desa wisata, permintaan terhadap produk dan jasa lokal meningkat, pekerjaan baru tercipta, dan usaha kecil seperti warung makan atau penginapan bisa berkembang.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Indonesia dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Berdasarkan data dari BPS Jawa Timur, jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2023 mencapai 200.550.000 pengunjung, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 2.430.000 orang. Data tersebut menunjukkan besarnya peluang ekonomi daerah yang dapat digarap melalui pengembangan sektor pariwisata, khususnya pariwisata berbasis masyarakat. Di sisi lain, letak

strategis serta kekayaan alam dan budaya menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah yang kompetitif dalam industri pariwisata nasional, termasuk kawasan Pulau Madura yang memiliki potensi wisata yang terus berkembang.

Potensi pariwisata yang besar di Provinsi Jawa Timur tentu berdampak pada kontribusi ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Namun, pemanfaatan potensi tersebut menunjukkan variasi yang signifikan ketika dilihat pada tingkat kabupaten, khususnya di wilayah Madura.

Tabel 1. 1 Perbandingan PAD Sektor Pariwisata Tahun 2024 di Pulau Madura

<i>Kabupaten</i>	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase Capaian
<i>Sumenep</i>	847.000.000	996.000.000	117,6%
<i>Bangkalan</i>	170.00.000	250.000.000	147,6%
<i>Sampang</i>	57.000.000	57.000.000	100%
<i>Pamekasan</i>	100.000.000	22.880.000	22,9%

Berdasarkan tabel 1.1 Perbandingan data PAD sektor pariwisata tahun 2024 di empat kabupaten di Pulau Madura menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok dalam pencapaian dan pemanfaatan potensi daerah. Kabupaten Bangkalan menempati posisi tertinggi secara persentase capaian dengan realisasi sebesar Rp250 juta dari target Rp170 juta, atau sekitar 147,1 persen. Sementara itu, Kabupaten Sumenep menorehkan capaian yang tidak kalah signifikan, yaitu sebesar Rp996 juta dari target Rp847 juta, atau 117,6 persen, dan merupakan yang tertinggi dari sisi nominal.

Di antara keempat kabupaten tersebut, Kabupaten Sumenep memiliki potensi PAD sektor pariwisata yang paling besar. Tingginya capaian PAD di Sumenep tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya objek wisata yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan, tetapi juga oleh ketersediaan infrastruktur penunjang seperti fasilitas penginapan. Keberadaan hotel, homestay, dan losmen yang

tersebar di berbagai wilayah, termasuk di sekitar desa-desa wisata, menjadi faktor penting dalam menarik dan menampung wisatawan dalam jumlah besar. Fasilitas penginapan yang memadai meningkatkan durasi kunjungan wisatawan, yang pada gilirannya berdampak langsung terhadap peningkatan belanja wisata dan kontribusi terhadap PAD.

Kabupaten Sumenep juga unggul dalam hal jumlah dan pengelolaan desa wisata. Desa wisata seperti Gili Labak, Gili Iyang, dan beberapa desa lainnya telah berkembang menjadi destinasi unggulan yang menawarkan pengalaman wisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Desa wisata tidak hanya memperkuat daya tarik Sumenep sebagai destinasi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi pariwisata, seperti penyediaan jasa akomodasi, kuliner, pemandu wisata, serta produk kerajinan lokal. Interaksi langsung antara wisatawan dan masyarakat desa turut menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata yang melibatkan masyarakat secara aktif dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam memperkuat sektor pariwisata daerah. Meskipun demikian, tidak semua desa wisata di Kabupaten Sumenep telah berkembang secara optimal. Meskipun sebagian desa wisata telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, masih terdapat desa-desa yang potensinya belum sepenuhnya tergali dan terdokumentasikan. Salah satu desa yang mulai menunjukkan geliat pengembangan pariwisata, meskipun belum banyak terekspos dalam data resmi, salah satunya adalah Desa Pagarbatu yang terletak di Kecamatan Saronggi. Meskipun belum memiliki data konkret terkait pencapaian maupun penghargaan di sektor pariwisata, Desa Pagarbatu dinilai memiliki potensi awal yang

menjanjikan berdasarkan kondisi geografis, lingkungan alam yang masih asri, serta kehidupan sosial budaya masyarakat yang kuat. Desa ini menarik untuk dikaji karena berada dalam tahap awal pengembangan desa wisata, di mana partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan. Karena, pembangunan desa wisata tidak cukup hanya dengan mengandalkan keindahan alam dan budaya.

Hal yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat desa itu sendiri. Tanpa partisipasi masyarakat, program pengembangan desa wisata tidak akan berjalan dengan baik. Masyarakat harus dilibatkan sejak awal, mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai mengevaluasi kegiatan pariwisata di desa. Dengan cara ini, mereka merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan desa wisata. Dari kacamata ekonomi pembangunan, partisipasi masyarakat ini penting agar manfaat pembangunan bisa dirasakan secara adil dan merata. Sayangnya, di lapangan tidak semua masyarakat ikut terlibat secara aktif. Ada yang sudah aktif membantu, seperti ikut kerja bakti dan menyumbangkan ide, tetapi ada juga yang masih pasif atau tidak tertarik. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain kurangnya informasi, keterbatasan keterampilan, dan minimnya dukungan dari pemerintah maupun lembaga lain. Masalah ini menjadi tantangan besar bagi Desa Pagarbatu dalam mewujudkan desa wisata yang berhasil.

Dari hasil pengamatan awal, terlihat bahwa masyarakat Pagarbatu sudah mulai ikut serta dalam kegiatan desa wisata. Ada yang membantu secara langsung dalam pembangunan jalan atau fasilitas wisata, ada juga yang memulai usaha kecil seperti warung dan oleh-oleh. Tapi keterlibatan ini belum merata. Masih banyak warga yang belum tahu atau belum yakin apa manfaat dari desa wisata

bagi kehidupan mereka. Selain itu, peran lembaga seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) juga belum maksimal dalam mengajak masyarakat untuk aktif berkontribusi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, seperti di Desa Pentingsari (Yogyakarta), Desa Trunyan (Bali), dan Desa Colo (Kudus). Penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan pentingnya dukungan pemerintah, modal sosial, kepemimpinan lokal, dan kesadaran masyarakat sebagai faktor-faktor penentu tingkat partisipasi. Tapi penelitian tentang hal ini di Madura, khususnya di Desa Pagarbatu Kabupaten Sumenep, masih sangat terbatas. Padahal, kondisi sosial dan budaya di Madura punya ciri khas tersendiri yang perlu dikaji lebih lanjut.

Pemerintah Desa Pagarbatu sendiri sudah melakukan beberapa upaya, seperti mengalokasikan dana desa untuk membangun fasilitas wisata dan mendorong tabungan warga untuk mendukung pengembangan desa. Dari sudut pandang ekonomi, ini adalah langkah awal yang baik untuk menciptakan pertumbuhan dari dalam desa (pertumbuhan ekonomi lokal). Namun, agar pembangunan benar-benar berhasil, harus dipastikan bahwa semua warga punya kesempatan yang sama untuk terlibat dan mendapatkan manfaat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat serta kelompok masyarakat Desa Pagarbatu dari sudut pandang bentuk dan tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat . Penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh kepada desa lain yang akan mengembangkan desa wisata. Berdasarkan analisa tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Pagarbatu Kabupaten Sumenep.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisa bagaimana bentuk partisipasi Masyarakat dalam pengembangan potensi desa wisata Pagarbatu ?
2. Menganalisa bagaimana tingkat partisipasi Masyarakat dalam pengembangan potensi desa wisata Pagarbatu ?
3. Bagaimana Perumusan Strategi yang sesuai menurut teori dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat Pagarbatu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi Masyarakat dalam pengembangan potensi desa wisata Pagarbatu.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi Masyarakat dalam pengembangan potensi desa wisata Pagarbatu.
3. Untuk menghasilkan strategi alternatif yang tepat dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat desa pagarbatu dalam pengembangan potensi desa wisata

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan dan juga penambahan teori dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi pembanding terhadap penelitian-penelitian dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat terhadap peneliti, pembaca dan juga Pemerintah Desa serta pengelola dalam hal menentukan strategi pengembangan yang tepat. Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan peningkatan pengetahuan terhadap Pemerintah Daerah dan juga warganya.